

MANHAJ

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

**PERGESERAN CERAI GUGAT OLEH ISTRI 10 TAHUN TERAKHIR
DI PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU**

Yusmita

**MOTIVASI NASABAH DAN PRODUK PEGADAIAN SYARI'AH
KOTA PALU SULAWESI TENGAH**

Taufik

**PRAKTIKUM MEMBAHAS KITAB
DI JURUSAN SYARI'AH STAIN BENGKULU**

Suwarjin

**PEMBELAJARAN ILMU-ILMU FIQH
DALAM MEMBENTUK NALAR KEILMUAN MAHASISWA
(Studi Kasus Di STAIN Bengkulu)**

Saepudin, dkk

**TOLERANSI BERAGAMA SANTRI DALAM MULTIKULTURALISME
(Studi tentang Model Komunikasi, Pendekatan dan Materi Pendidikan
Multikulturalisme di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu)**

Ujang Mahadi

**PARADIGMA HUKUM ISLAM DI INDONESIA:
Pengaruh Fiqh Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam**

Khusnul Khotimah

METODE MASLAHAT DALAM IJTIHAD IMAM SYAFI'I

Suansar Khatib



**P3M
STAIN BENGKULU**

MANHAJ

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

PERGESERAN CERAI GUGAT OLEH ISTRI 10 TAHUN TERAKHIR
DI PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU

Yusmita

MOTIVASI NASABAH DAN PRODUK PEGADAIAN SYARI'AH
KOTA PALU - SULAWESI TENGAH

Taufik

PRAKTIKUM MEMBAHAS KITAB
DI JURUSAN SYARI'AH STAIN BENGKULU

Suwarjin

PEMBELAJARAN ILMU-ILMU FIQH
DALAM MEMBENTUK NALAR KEILMUAN MAHASISWA
(Studi Kasus Di STAIN Bengkulu)

Saepudin, dkk

TOLERANSI BERAGAMA SANTRI DALAM MULTIKULTURALISME
(Studi tentang Model Komunikasi, Pendekatan dan Materi Pendidikan
Multikulturalisme di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu)

Ujang Mahadi

PARADIGMA HUKUM ISLAM DI INDONESIA:
Pengaruh Fiqh Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam

Khusnul Khotimah

METODE MASLAHAT DALAM IJTIHAD IMAM SYAFI'I

Suansar Khatib



P3M
STAIN BENGKULU

Vol. 11 No. 1, Januari – Juni 2011

ISSN 1639 - 2196

MANHAJ

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pengarah

Dr. H. Sirajuddin M. M.Ag., MH

Penanggung jawab

Drs. H. Zulkarnain S, M.Ag

Penyunting Pelaksana

Saepudin, S.Ag., M.Si

Japarudin, S.Sos.I., M.Si

Anggota Penyunting

Rido Syabibi, M.Ag

Alfauzan Amin, M.Ag

Ismail, M.Ag

Tata usaha

Rose Triana, S.Sos

Rozian Karnedi, M.Ag

Alamat

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Bengkulu

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung A

Kontak person: 081328686121 / 081377725711

MANHAJ Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Bengkulu. Redaksi jurnal menerima tulisan berupa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh berbagai kalangan dengan disiplin ilmu sosial keagamaan, yang belum pernah diterbitkan di media publikasi lain. Naskah diketik pada kertas A4 spasi ganda huruf Times New Roman font 12 dengan 15 -20 halaman. Penyunting berhak memperbaiki susunan dan desain tulisan tanpa merubah isi tulisan yang dimuat.

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	
PERGESERAN CERAI GUGAT OLEH ISTRI 10 TAHUN TERAKHIR DI PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU <i>Yusmita</i>	1
MOTIVASI NASABAH DAN PRODUK PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALU – SULAWESI TENGAH <i>Taufik</i>	17
PRAKTIKUM MEMBAHAS KITAB DI JURUSAN SYARIAH STAIN BENGKULU <i>Suwarjin</i>	29
PEMBELAJARAN ILMU-ILMU FIQH DALAM MEMBENTUK NALAR KEILMUAN MAHASISWA (Studi Kasus Di Stain Bengkulu) <i>Saepudin, dkk.</i>	49
TOLERANSI BERAGAMA SANTRI DALAM MULTIKULTURALISME (Studi tentang Model Komunikasi, Pendekatan dan Materi Pendidikan Multikulturalisme di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu) <i>Ujang Mahadi</i>	68
PARADIGMA HUKUM ISLAM DI INDONESIA: Pengaruh Fiqh Syafi'i dalam Kompilasi Hukum Islam <i>Khusnul Khotimah</i>	89
METODE MASLAHAT DALAM IJTIHAD IMAM SYAFI'I <i>Suansar Khatib</i>	105

PENGANTAR REDAKSI

Alhamdulillah, jurnal MANHAJ Vol. 11 No. 1, Januari – Juni 2011 sebagai jurnal yang mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, kembali dapat hadir di hadapan pembaca.

Seperti biasa dalam setiap edisi selalu menghadirkan berbagai hasil penelitian dengan corak yang tetap kaya dengan khazanah berbagai disiplin keilmuan, seiring dengan dinamika STAIN Bengkulu dan civitas akademiknya yang selalu berbenah dalam merespon perkembangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial keagamaan, menuju eksistensi sebuah IAIN di propinsi Bengkulu.

Harapan dewan redaksi, semoga kehadiran jurnal MANHAJ dapat memberikan informasi dengan disiplin ilmu yang beragam, serta dapat mendukung peningkatan kualitas pelaporan sebuah hasil penelitian dan penyebarannya, dan menambah khazanah keilmuan yang lebih baik.

Dewan redaksi

TOLERANSI BERAGAMA SANTRI DALAM MULTIKULTURALISME
(Studi tentang Model Komunikasi, Pendekatan dan Materi Pendidikan
Multikulturalisme di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu)

Ujang Mahadi*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui model komunikasi, pendekatan dan materi pendidikan dalam penanaman paham Multikulturalisme multikulturalisme (toleransi beragama) bagi para santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu belum menjadi prioritas utama dan tidak terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan. Materi multikultural disampaikan oleh para Ustadz kepada para santri di luar kelas melalui khutbah jum'at, kuliah subuh, muhadharah, dan taustiyah. Walaupun dibicarakan di dalam kelas sifatnya hanya kebetulan karena ada ayat-ayat yang muatannya bersentuhan dengan nilai-nilai multikultural. Sedangkan model komunikasi penyampaian paham multikulturalisme kepada para santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu bersifat verbal dan linier (monologis - satu arah), sehingga tidak ada kesempatan bagi santri untuk bertanya dalam rangka mendalami, memahami, dan mendiskusikan sesuatu yang masih belum jelas berkaitan dengan multikultural.

Kata kunci: *multikulturalisme, konflik, toleransi, santri*

LATAR BELAKANG

Pondok pesantren merupakan salah satu model dari pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini mengingat kebanyakan pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Pesantren dengan cara hidupnya yang bersifat kolektif barangkali merupakan perwajahan atau cerminan dari semangat dan tradisi lembaga gotong royong yang umum terdapat di pedesaan (Rahardjo, 1988: 9). Nilai-nilai keagamaan seperti *ukhuwah* (persaudaraan), *ta'awun* (kerja sama), *jihad* (berjuang), taat, sederhana, mandiri, ikhlas dan berbagai nilai eksplisit dari ajaran Islam lain yang mentradisi di pesantren ikut mendukung kelestariannya.

Pesantren berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai pusat belajar masyarakat atau *community learning centre*. Pada konteks ini, pesantren memiliki otonomi dengan menggunakan model manajemen sendiri (*self management*) yang belakangan dikenal dengan istilah manajemen pendidikan berbasis masyarakat. Dalam sejarahnya, ketika lembaga-lembaga sosial yang lain belum berjalan secara fungsional maka pesantren telah menjadi pusat kegiatan masyarakat dalam belajar agama, beladiri, mengobati orang sakit, konsultasi pertanian, mencari jodoh sampai pada menyusun perlawanan terhadap kaum penjajah. Tegasnya, pesantren menjadi lembaga pendidikan yang unik, tidak saja karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga pendidikan agama ini yang khas.

Pesantren ini memiliki jaringan sosial yang kuat dengan masyarakat dan dengan sesama pesantren karena sebagian besar pengasuh pesantren tidak saja terikat pada kesamaan pola pikir, paham keagamaan, namun juga memiliki hubungan kekerabatan yang cukup erat (Dhofier, 1982: 60).

Seiring dengan derasnya arus perubahan sosial akibat modernisasi-industrialisasi, mau tidak mau menuntut pesantren untuk memberikan reaksi atau respon secara memadai. Reaksi pesantren menghadapi perubahan yang berjalan selama ini ada yang lunak dan ada yang keras. Ada yang membuka dan ada yang menutup diri. Namun meski ada yang mendefinisikan zaman sekarang sebagai zaman edan atau *jahiliyah modern*, ternyata tidak sedikit yang mencoba melakukan transformasi dengan melakukan mobilitas budaya yang menyebabkan doktrin, lembaga dan pranata sosial menjadi tetap relevan. Selain itu, pesantren juga selalu dituntut untuk melakukan *adjustment and rejustment* (Azra, 1999: 108), mulai dari melakukan diversifikasi program dengan membuat yayasan, memasukkan sistem sekolah, kontekstualisasi kitab kuning, memodernisasi manajemen pengelolaan dan lain-lain.

Pesantren dalam menghadapi perubahan dituntut melakukan kontekstualisasi tanpa harus mengorbankan watak aslinya selaku institusi pendidikan, keagamaan dan sosial. Pesantren harus membenahi kelemahannya di antaranya dengan menerapkan manajemen pendidikan berbasis masyarakat. Apalagi berdasarkan tuntutan modernisasi setiap lembaga pendidikan termasuk lembaga pesantren harus bertumpu pada masyarakat.

* Penulis adalah dosen STAIN Bengkulu, alumnus UNPAD - Bandung

Pembaharuan pesantren dilakukan dalam upaya merefungsionalisasi pesantren agar peranan dan sumbangannya sebagai pelaku pembangunan masyarakat dirasakan secara nyata. Pada konteks ini, lembaga pesantren menempatkan diri sebagai institusi dinamisator dan katalisator pembangunan masyarakat desa bukan hanya di bidang keagamaan, namun juga di bidang-bidang kehidupan sosial lainnya. Gejala tumbuhnya minat pesantren untuk mengembangkan program kemasyarakatan secara sederhana dipetakan dalam dua bagian. *Pertama*, program kemasyarakatan yang tumbuh dan dikembangkan oleh inisiatif pihak pesantren sendiri sedangkan yang *kedua* adalah pendekatan program kemasyarakatan yang dikembangkan atas suatu kerjasama dengan pihak luar (Karcher, 1988: 92-93). Pesantren dalam kaitan dengan proses pengembangan masyarakat dituntut memosisikan dirinya sebagai pusat penyuluhan kesehatan, pusat pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat pedesaan dan pusat pemberdayaan bidang masyarakat, di samping tugasnya sebagai lembaga pendidikan keagamaan.

Megawati Soekarno Putri ketika menjabat Presiden pernah menginstruksikan Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) untuk mengembangkan pola pendidikan agama yang berwawasan multikultural (Muhamad Ali, 2002: 4). Sayang, himbauan itu belum mendapat tanggapan secara sungguh-sungguh. Wacana pendidikan multikulturalisme memang sempat menghangat di mass media dan menjadi bahan diskusi di sejumlah forum, hanya dalam perkembangannya tidak diikuti dengan sejumlah upaya secara sungguh-sungguh dan kontinue untuk memformulasikannya ke dalam gagasan yang lebih membumi. Bahkan dapat dikatakan, upaya mempromosikan konsep pendidikan multikultural sebagai bagian dari upaya meredam potensi konflik horisontal maupun vertikal bangsa akibat salah paham soal SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) belum berjalan secara memadai. Sebaliknya, para elit politik, elit agama, atau pakar ilmu sosial dalam menganalisa akar persoalan konflik cenderung menjadikan kesenjangan ekonomi dan sosial sebagai kambing hitam. Amat sedikit yang mau mengakui kalau persoalan konflik dan kekerasan itu amat berkait erat dengan praktik pengajaran (pendidikan) agama dan moral yang belum memupuk kerukunan bersama.

Sebagai implikasinya, upaya-upaya memperlunak kebekuan dan mencairkan kekakuan pemikiran keagamaan dan kemanusiaan dari masing-masing agama dan budaya belum dianggap terlalu penting untuk digiring ke ranah pendidikan. Mulai dari segi materi sampai metodologi yang diajarkan di sekolah, pesantren, seminar, simposium memiliki kecenderungan untuk mengajarkan pendidikan agama secara parsial (kulitnya saja). Materi

pendidikan agama misalnya lebih terfokus pada mengurus masalah *private affairs* (*al ahwal al syakhshiah*) semacam masalah keyakinan seorang hamba dengan Tuhannya *face to face*. Scakan masalah surga atau kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan ibadah atau akidah saja. Sebaliknya pendidikan keagamaan kurang peduli dengan isu-isu umum semacam sikap antikorupsi, wajibnya transformasi sosial, dan kepedulian terhadap sesama (Busman Edyar, 2003:4).

Fenomena di atas tentu saja patut disesalkan. Pasalnya, saat ini konsep pendidikan multikulturalisme yang berintikan penekanan upaya internalisasi dan karakterisasi sikap toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, adat dan lain-lain di kalangan peserta didik sangat dibutuhkan. Alasannya, kondisi-situasi bangsa saat ini belum benar-benar steril dari ancaman konflik etnis dan agama, radikalisme agama, separatisme, dan disintegrasi bangsa. Bahkan dapat dikatakan, serangkaian kerusuhan yang memakan ribuan korban tewas seperti kasus Pekalongan (1995), Tasikmalaya (1996), Rengasdengklok (1997), Sanggau Ledo, Kalimantan Barat (1996 dan 1997), Ambon dan Maluku sejak 1999, sampai Sampit - Kalimantan Timur (2000) sewaktu-waktu bisa meledak jika tanpa langkah antisipatif secara dini. Untuk itu, menghadirkan konsep pendidikan multikultural merupakan bagian dari usaha komprehensif dalam mencegah dan menanggulangi konflik bernuansa SARA.

Pendidikan multikulturalisme sangat bermanfaat untuk membangun kohesifitas, soliditas, dan intimitas di antara beragamnya etnik, ras, agama, budaya, serta kebutuhan di antara kita. Paparan di atas juga memberi dorongan dan spirit bagi lembaga pendidikan nasional untuk mau menanamkan sikap kepada anak didik untuk menghargai orang, budaya, agama, dan keyakinan yang dianut orang lain. Diharapkan, dengan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural dapat membantu siswa mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, dan keperibadiannya. Lewat penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah akan menjadi salah satu medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, seyogyanya kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didesiminasikan melalui lembaga pendidikan serta jika mungkin ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang, baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu

perhatian utama dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal itu dijelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (Megawati Soekarnoputri, 8 Juli 2003: 9).

MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana konsep pendidikan paham multikulturalisme di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu?
2. Bagaimana model komunikasi, pendekatan, dan materi pendidikan yang diberikan dalam penanaman paham multikulturalisme di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendapatkan, memahami, dan menganalisis secara mendalam Konsep Pendidikan Paham Multikulturalisme di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu.
2. Untuk menemukan Model Komunikasi, Pendekatan, dan Materi Pendidikan yang diberikan dalam Penanaman Paham Multikulturalisme di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu.

KEGUNAAN PENELITIAN

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep pendidikan multikultural yang dapat menjadi sebuah solusi dalam menciptakan harmonisasi (kerukunan hidup) ditengah elemen bangsa yang sangat kompleks dan beragam dari berbagai aspek.

Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan berguna dalam upaya internalisasi dan karakterisasi sikap toleransi terhadap perbedaan agama, ras, suku, adat dan lain-lain, terutama di kalangan peserta didik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk membuat formulasi yang lebih membumi oleh pihak-pihak yang berkompeten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian adalah mereka yang terlibat langsung dalam Pengelolaan Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu, diantaranya: Direktur/Wakil Direktur, Lurah Pondok, Kepala Sekolah, Tenaga Pengajar, dan Santri. Mengingat jumlah informan cukup banyak, maka informan akan dipilih dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan; observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Analisis data mengikuti pemikiran Creswell (dalam Bogdan dan Biklen, 1994: 153), dengan alur analisis diawali dengan "mengumpulkan informasi

dari lapangan, menyortir informasi menjadi kelompok-kelompok, memformat informasi ke dalam sebuah cerita atau gambar, dan menulis naskah kualitatif. Semua kegiatan ini dilakukan secara bersamaan". Analisis data dilakukan secara kontinyu dari awal hingga akhir penelitian.

LANDASAN TEORI

A. Paradigma Pendidikan Multikulturalisme

Sebagian ahli sosial beranggapan bahwa gagasan pendidikan multikultural merupakan sebuah solusi yang dianggap tepat dalam menciptakan kerukunan atau harmonisasi di antara elemen bangsa yang beragam (Geneva Gay, 1994: 2). Ketika kehidupan berbangsa dan bernegara belum steril dari berbagai konflik sosial seperti sekarang maka pendidikan multikultural menjadi salah satu bahan perbincangan yang cukup penting.

Pada konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lebih jauh lagi, penganut agama dan budaya yang berbeda dapat belajar untuk melawan atau setidaknya tidak setuju dengan ketidaktoleranan (*intorelable*) seperti inkuisisi (pengadilan negara atas sahnya-teologinya teologi atau ideologi), perang agama, diskriminasi, serta hegemoni budaya di tengah kultur monolitik dan uniformitas global.

R.H.A. Soenarjo (1971: 94), menyatakan penanaman sikap toleransi dan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan serta latar belakang sosial-budaya berbeda-beda sebagaimana ditekankan dalam pendidikan multikultural tampaknya sejalan dengan ajaran dan nilai etis al-Qur'an. Hal ini antara lain dapat kita simak dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13..

Surat lain menegaskan bahwa perbedaan pandangan hidup, dan keyakinan hendaknya menjadi penyemangat untuk saling berlomba menuju kebaikan. Kelak di akhirat, Allah yang akan menerangkan mengapa dirinya berkehendak seperti itu dan keputusan yang paling adil di tangan-Nya (Q.S. al-Maidah: 48). Pemahaman yang didasarkan kesadaran kemajemukan secara sosial, budaya dan agama telah menjadi dasar dalam membangun gagasan pendidikan multikulturalisme.

Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep atau pemikiran tidak muncul dalam ruangan yang kosong, namun ada kepentingan politik, sosial, ekonomi dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Wacana pendidikan multikultural pada awalnya sangat bias Amerika karena punya akar sejarah dengan gerakan hak asasi manusia (HAM) dari berbagai kelompok yang

tertindas di negeri tersebut. Banyak laenkan sejarah atau asal-usul pendidikan multikultural yang merujuk pada gerakan sosial orang Amerika keturunan Afrika dan kelompok kulit berwarna lain yang mengalami praktik diskriminasi di lembaga-lembaga publik pada masa perjuangan hak asasi pada tahun 1960-an (Paul Gorski, 2003: 1).

Didorong oleh tuntutan warga Amerika keturunan Afrika, Latin/Hispanic, warga pribumi dan kelompok marginal lain terhadap persamaan kesempatan pendidikan serta didorong oleh usaha komunitas pendidikan profesional untuk memberikan solusi terhadap masalah pertentangan ras serta rendahnya prestasi kaum minoritas di sekolah, menjadikan pendidikan multikultural sebagai slogan yang sangat populer pada tahun 1990-an (Cameron McCharthy, 1994, Number 1 Volume 44: 1). Selama dua dekade konsep pendidikan multikultural menjadi slogan yang sangat populer di sekolah-sekolah AS. Secara umum, konsep ini diterima sebagai salah satu strategi penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka macam di negara ini.

Konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar AS khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, ras, agama dan budaya seperti Indonesia. Sekarang ini, pendidikan multikultural secara umum mencakup ide pluralisme budaya. Tema umum yang dibahas meliputi pemahaman budaya, penghargaan budaya dari kelompok yang beragam dan persiapan untuk hidup dalam masyarakat pluralistik (William H Watkins, 1994, Number 1 Volume 44: 9).

Pada konteks Indonesia, perbincangan tentang konsep pendidikan multikultural semakin memperoleh momentum. pasca runtuhnya rezim otoriter-militeristik Orde Baru karena hempasan badai reformasi. Era reformasi ternyata tidak hanya membawa berkah bagi bangsa Indonesia namun juga memberi peluang meningkatnya kecenderungan primordialisme. Untuk itu dirasakan perlu kita menerapkan paradigma pendidikan multikultur untuk menangkal semangat primordialisme tersebut (Conny Semiawan, 13 September 2003: 10).

Secara generik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan tujuan untuk menciptakan persamaan peluang pendidikan bagi semua siswa yang berbeda-beda ras, etnis, kelas sosial dan kelompok budaya. Salah satu tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokrasi-pluralistik serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi, dan

komunikasi dengan warga dari kelompok beragam agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama.

Menurut James A. Banks (1997: xi), tujuan pendidikan multikultural dirumuskan sebagai berikut: "Tujuan pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan. Pendidikan multikultural dimaksudkan untuk membantu para siswa dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam berpartisipasi dalam masyarakat yang bebas dan demokrasi. Pendidikan multikultural mengembangkan kebebasan, kemampuan dan keterampilan dalam menerobos batas-batas budaya dan etnis dalam berpartisipasi dengan kebudayaan dan kelompok lain".

Masih menurut James A. Banks, substansi pendidikan multikultural adalah pendidikan untuk kebebasan (*as education for freedom*) sekaligus sebagai penyebar-luasan gerakan inklusif dalam rangka mempererat hubungan antar sesama (*as inclusive and cementing movement*). Jadi pendidikan multikultural bersifat antiras, mendasar, penting (berguna) untuk semua siswa, pervasif (dapat meresap, menembus, dan merembes), untuk keadilan sosial serta merupakan sebuah proses dan pedagogi kritis.

Salah satu ciri utama pendidikan multikultural adalah tidak adanya kebijakan dari lembaga pendidikan (sekolah) yang menghambat toleransi termasuk tidak adanya penghinaan terhadap ras, etnis, dan jenis kelamin. Pendidikan multikultural harus menumbuhkan toleransi di kalangan anak didik terhadap perbedaan budaya, misalnya menyangkut tata cara atau adat istiadat berpakaian, musik, makanan kesukaan, memberikan kebebasan bagi mereka dalam merayakan hari-hari besar umat beragama serta memperkokoh kesadaran mereka agar mau terlibat dalam pengambilan keputusan secara demokratis (Jennifer Romanowski, 2002: 2).

Sebagai konsekuensinya, agar pendidikan lebih multikultural, pendidikan dan pengajaran harus memperkokoh pluralisme dan menentang adanya rasisme, diskriminasi gender dan bentuk-bentuk lain dari intoleransi serta dominasi sosial. Pada konteks ini tentu harus dilakukan transformasi kurikulum, model pembelajaran, suasana sekolah, kegiatan ekstra-kurikuler, dan peran guru menjadi multikultural. Menurut Gay's, prinsip-prinsip penting dalam menerapkan pendidikan multikultural adalah kurikulum berdasarkan sejarah dan berpusat pada keragaman, berorientasi pada perbaikan, pengajaran mengarah pada keragaman, kurikulum tergantung pada konteks, bersifat menyerap keragaman dan dapat diterapkan secara luas, bersifat komprehensif serta mencakup semua level pendidikan (Francisco Hidalgo, 2003: 51).

Penggunaan strategi *cooperative learning* dalam pendidikan multikultural diasumsikan bisa mendorong anak untuk saling belajar tentang segi-segi positif dari temannya. Dengan cara ini, mereka akan terkondisikan dengan proses pembelajaran di mana seorang siswa belajar hidup bersama siswa lain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi dan saling memahami (Conny Semiawan, 2003: 1).

Penerapan paradigma pendidikan multikultural dengan strategi *cooperative learning* diyakini dapat memupuk nilai-nilai baru (*co-creating new values*) pada diri anak didik berupa kesediaan untuk mau hidup rukun dengan sesama dalam suasana kemajemukan. Proses pembelajaran ini diakui akan dapat mengubah cara berpikir anak didik dari sebelumnya bersifat sempit dan fanatis dengan membanggakan budaya mereka sendiri (*microculture*) menjadi demokratis, multikulturalis-pluralis serta mampu menghargai budaya orang lain.

Pada akhirnya, bisa tidaknya wacana pendidikan multikulturalisme diterapkan dalam lembaga pendidikan tergantung pada ikhtiar kita bersama. Pada konteks ini, Depdiknas R.I agaknya sebagai pihak yang pantas ditunggu peran aktifnya. Setidaknya Depdiknas R.I mau mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Pandangan multikulturalisme sebaiknya dimasukkan dalam kurikulum sekolah, sebagai mata pelajaran ekstra-kurikuler atau secara formal dibakukan menjadi bagian dari kurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah bekas konflik berdarah antar sukubangsa, seperti di Poso, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan berbagai tempat lainnya. Penerapan pandangan multikulturalisme dalam dunia pendidikan diharapkan menjadi upaya preventif dan antisipatif terhadap kemungkinan munculnya konflik berdarah antar sukubangsa (Parsudi Suparlan, 2003: 1).

Pendidikan multikultural merupakan pelembagaan filsafat pluralisme budaya dalam proses pendidikan, yang dalam praktiknya pengelolaan pendidikan didasarkan pada semangat menjunjung tinggi prinsip persamaan, saling menghargai, penerimaan, pemahaman serta komitmen moral untuk keadilan sosial (Geneva Gay, 1994: 2). Pendidikan multikultural perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat. Sejauh ini, ada empat pendekatan dalam pendidikan multikultural yang dapat dipertimbangkan oleh pendidik dalam mengajarkan pendidikan multikultural. *Pertama*, pengajaran tentang eksistensi dan peranan berbagai kelompok budaya dalam kehidupan masyarakat. *Kedua*, pendekatan tambahan, di mana pelajaran multikultural dan unit-unit kajian multikultural melengkapi kurikulum yang ada. *Ketiga*, pendekatan

transformasi, di mana sifat dasar kurikulum dan pengajaran yang sudah berjalan diubah dengan merefleksikan pandangan dan pengalaman kebudayaan, etnik, ras dan kelompok sosial yang beragam. *Keempat*, pendekatan tindakan sosial dan pengambilan kebijakan, dengan mengajarkan para siswa bagaimana menjelaskan nilai-nilai budaya dan etnis mereka serta menggunakan tindakan sosial politik untuk meningkatkan persamaan, kebebasan dan keadilan bagi setiap orang.

Sleeter dan Grandt telah mengkaji berbagai literatur tentang pendidikan multikultural untuk menentukan bagaimana bidang pendidikan multikultural dikonseptualisasikan. Analisis mereka menghasilkan empat pendekatan umum dalam pendidikan multikultural. *Pertama*, pengajaran kepada siswa yang berbeda-beda secara budaya untuk menyesuaikan dengan arus besar masyarakat. *Kedua*, pendekatan hubungan kemanusiaan yang menekankan keanekaragaman masyarakat yang mau hidup bersama secara harmonis. *Ketiga*, pendekatan kajian kelompok tunggal yang berkonsentrasi pada pengembangan kesadaran, penghargaan, penerimaan satu kelompok pada satu waktu. *Keempat*, memusatkan pada penghilangan prasangka, memberikan persamaan kesempatan dan keadilan sosial untuk semua kelompok dan mempengaruhi distribusi kekuasaan secara wajar terhadap kelompok budaya dan etnis. Berdasarkan hal ini, mereka menambahkan pendekatan *Kelima*, pendidikan dilaksanakan secara multikultural dan menyusun kembali masyarakat serta mengajarkan siswa menjadi pemikir kritis, analitis dan pembaharu sosial yang berkomitmen untuk meredistribusikan kekuasaan dan sumber-sumber lain di antara kelompok yang berbeda-beda.

Model pendidikan multikultural yang lain adalah mereformasi sistem pembelajaran, bukan merevisi materi pembelajaran. Pada konteks ini, dilakukan *affirmative action* (tindakan khusus) misalnya dengan memfasilitasi pembauran dan interaksi antar siswa baru dari berbagai latar belakang budaya serta menyusun berbagai program kelas lintas etnis.

Jika mengaca pada konteks sosial Indonesia yang mejemuk maka model pendidikan multikultural yang digunakan bisa memadukan dua model pembelajaran multikultural di atas. Model penambahan informasi dilakukan dengan menyusun teks sejarah baru yang mengakomodasikan kontribusi dan partisipasi warga dari berbagai latar belakang dalam pembentukan Indonesia secara lebih fair. Sementara itu, model reformasi sistem pembelajaran antara lain dilakukan dengan menciptakan sistem pembelajaran yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai toleransi, kepekaan sosial dan mengurangi prasangka antar kelompok.

Secara terminologis, istilah pesantren sudah mengisyaratkan adanya interaksi yang harmonis antara Islam dengan budaya lokal (Nusantara). Konon, "Pesantren" merupakan pinjaman dari bahasa sangsekerta : *santri*, yang berarti orang yang pandai membaca kitab suci. "Pesantren" sendiri dimaknai sebagai tempat penganut agama Hindu dan Budha yang menyelenggarakan pembelajaran dalam rangka memahami kitab suci mereka. Dan, pada gilirannya, istilah tersebut lebih sering digunakan dan bahkan menjadi istilah khas Islam Indonesia.

Dalam pengertian yang lebih dalam, artikulasi konsep *Tawassuth* (Modernisasi) yang diyakini para ulama pemangku pesantren telah menempatkan mereka pada satu posisi untuk menerima tradisi dan budaya lokal yang berkembang di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan ajaran Islam bahkan menjadikannya *wasilah* (media) strategis bagi penanaman dan pengembangan nilai-nilai aqidah ajaran Islam itu sendiri. Jelasnya, pesantren lokal dengan budaya lokal telah memposisikan pesantren khususnya pesantren di Jawa sebagai bagian dari instansi budaya setempat yang sangat penting dan tidak terpisahkan.

Karakteristik Islam yang di tampilkan oleh para Ulama pemangku Pesantren sebagaimana Nabi saw mengajarkannya adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai *intifah* (inklusif), *tawassuth* (moderat), *musawah* (persamaan), dan *tawazun* (seimbang). Karena itu maka pesantren tampil pula sebagai agen pembudayaan nilai, norma sekaligus pesan-pesan keagamaan yang sarat dengan harmoni, kerukunan, persatuan dan kedamaian, bahkan para ahli menilai pesantren mempunyai peran yang cukup signifikan dalam melestarikan budaya lokal, termasuk memelihara nilai-nilai dan tatanan sosial yang harmonis disekelilingnya.

Prinsip-prinsip ajaran damai dalam Islam ini bercermin pada *uswah hasanah* yang tercermin pada akhlak sosial Rasulullah, pada abad kesembilan hijriyah Rasul saw mengikat perjanjian dengan Kabilah Taghlib, padahal saat itu kaum muslimin dalam keadaan kuat dan orang-orang arab takluk padanya, tetapi Rasul saw menghormati mereka tetap dalam agamanya, Kristen. Rasul saw berdamai dengan warga Kristen Najran dan membiarkan mereka bebas menganut agamanya. Ia pun mengambil *jizyah* dari orang-orang Yaman yang tetap dalam agamanya, Kristen.

Begitu pula dengan para sahabat, mereka melakkan apa yang dilakukan Rasul saw. Abu Bakar berpesan kepada Usman ibn Zaid ketika di utus ke Syiria agar bersikap bijak terhadap orang yang mengikat perjanjian dengannya, menunjukkan akhlak yang baik ketika berperang, menjaga harta mereka,

dan membebaskan para rahib mengimani apa yang mereka yakini.

Pada masa Abu Bakar, Kahlid ibn Walid menyepakati dengan warga Kristen Khairat dimana gereja-gereja dan istanan mereka tidak dihancurkan dan ia tidak melarang mereka membunyikan lonceng gereja atau mengeluarkan salib di hari raya. Disepakati pula agar saling tolong menolong dan tidak saling menggunjing. Sementara itu, para orangtua yang sudah tidak bisa bekerja tidak dikenakan biaya pajak, bahkan ia sendiri dan anak-anaknya mendapatkan santunan dari Baitul Mal kaum Muslimin.

Apa yang dikemukakan disini, hanyalah sebagian contoh kecil dari sekian banyak testimony betapa Islam dengan kekuatan nilai dan kemuliaan ajaran yang dikandung harus senantiasa diposisikan dan diimplementasikan secara elegan dan bermartabat dimanapun dan dalam situasi apapun. Inilah salah satu alasan mengapa pesan-pesan yang disampaikan Rasul saw dapat diterima dengan baik oleh umat dimuka bumi ini, dan teladan inipula yang dicontoh dan dipraktikkan oleh para ulama pemangku pesantren di Indonesia.

Mengingat risalah *samawiyat* yang dibawa Rasul saw adalah *minadz dzulumat ilan-nur*, mereka jauh sebelumnya, model inipula yang digunakan nabi Musa as dan nabi Harun as saat menghadapi Fir'aun (Q.S. Thaha: 44). Sementara sikap lunak dan lemah lembut adalah keniscayaan dalam sebuah dakwah tidak menghindar, bahkan diupayakan dengan cara-cara elegan dengan membangun komunikasi yang baik (Q.S. Ali Imran: 159). Artinya jelas, bahwa Islam dikembangkan dengan cara dan nuansa yang penuh kedamaian dan lemah lembut, bukan dengan cara sebaliknya; menakutkan dan penuh kekerasan.

B. Dinamika Pcsan Damai

Senyatanya, sebuah tes nash tidak lahir ke dalam ruang hampa yang sunyi dari persoalan manusia, karena al-Qur'an sendiri mengemban misi petunjuk bagi umat manusia. Ia lahir bersamaan mengiringi pengalaman dan sejarah umat manusia. Artinya, ada kontes kesejarahan yang dapat menjadi penerjemah manakala teks itu muncul. Sementara *kutub ash-shafrah* (kitab kuning) ia menjadi "kitab suci"-nya para santri acabkali membuat informasi yang *debatable*. Ia yang menempati posisi "tafsir operasional" atas al-Qur'an terkadang memaksa kening berkerut memahaminya.

Sebagai contoh, konsep jihad dalam fiqih lebih sering dimaknai sebagai *jihad qitali* (perang fisik), dimana setiap orang diwajibkan melakukannya manakala orang lain (*kafir*) menyerang orang Islam (*fardlu 'ain*), sementara jika mereka tidak melakukan penyerangan, kewajiban jihad itu tetap ada meski

bukan lagi kewajiban individual (*fardlu kifayah*). Artinya, kaum muslimin akan mendapatkan "dosa" jika dalam satu tahun tidak ada seorang pun melakukan jihad. Dengan kata lain, jihad atau perang fisik yang dimungkinkan adanya pertumpahan darah itu harus tetap terjadi pada setiap tahunnya (fadth al-muin: 4/180; muhadz dz ab: 2/318)

Ahl dzimmah yang semetinya mendapatkan perlindungan kaum muslimin justru "diperbolehkan" untuk diperlakukan "tidak semestinya". Misalnya, jika orang muslim bertemu mereka diperjalanan, maka mereka bukan saja tidak boleh diberi ucapan salam bahkan harus "dipepet" kepinggir jalan untuk disingkirkan. Selain itu, mereka bukan saja tidak diperbolehkan untuk memiliki kendaraan yang lebih bagus dari kendaraan umat Islam, bahkan tidak diperbolehkan memiliki pakaian yang bagus, dan harus mengenakan pakaian yang berbeda dengan umat Islam (muhadzdzab: 2/254.)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa literatur pesantren atau tepatnya kitab kuning yang menjadi bacaan wajib para santri itu memiliki potensi untuk dijadikan parameter bagi sejumlah tindakan yang dari sudut pandang manapun, substansinya menjauh dari apa yang dipesankan dan dilakukan Rasul saw pada masanya, bahkan sejarah para sahabat sekalipun. Realitas ini tidak lagi sesederhana yang diduga karena berhubungan erat dengan *mashalat 'amma dan "bertabrakan"* dengan konsep *adl-dloruryyad al-khamsat* yang wajib ditegakkan umat manusia.

Persoalan yang serupa dengan contoh tadi diyakini cukup banyak dan untuk memahaminya secara baik diperlukan keseriusan dan ketajaman analisis, sebab sebagaimana dikemukakan sebelumnya, terlalu banyak bukti betapa nilai dan ajaran Islam itu sangat menghormati perbedaan dan sarat dengan pesan-pesan toleransi. Dan, makna jihad yang diajarkan selama ini adalah sebagai motivasi membangun etos santri agar memiliki semangat yang tekun dalam belajar sekaligus memberikan basis moralitas bahwa *jihad akbar* adalah mengontrol hawa nafsu. Kalaupun jihad dimaknai mengangkat senjata maka jihad dalam Islam bukanlah tujuan melainkan hanya media atau jalan. Adapun tujuan jihad atau *qital* adalah *al-hidayah* (petunjuk). Apabila hidayah itu dimungkinkan dengan argumentasi atau dialog, maka itu lebih baik (mughni al-muhtar. 4/210).

Bahkan untuk kasus-kasus tertentu, dengan mudah dicatat sejarah, seperti halnya dulu Rasul saw membangun komitmen (perjanjian) untuk hidup berdampingan secara damai dengan non muslim, maka non muslim tersebut tidak boleh diperlakukan secara tidak baik. Dalam surat an-nisa: 92 dijelaskan bahwa umat Islam harus memberikan *diyat* atau

denda yang diberikan kepada keluarga non-muslim yang terbunuh jika ia sudah terikat perjanjian/*mitsaq* dengan umat Islam. Dan, orang yang membunuh non muslim adalah katagori tersebut, 'terpaksa' -kata rasul saw- tidak akan memperoleh baunya surge (hadits *muttafaq 'alaih*).

Persoalannya, saat ini konsep jihad sudah menjadi rebutan banyak orang untuk dijadikan legitimasi atau sejumlah sikap dan perilaku masing-masing melakukan 'sesuatu' yang diklaim sebagai tuntutan syia'r Islam atau *li 'la kalimatillah*, meskipun 'terpaksa' harus mengorbankan mereka juga yang tidak berdosa dan tidak samasekali memiliki keterkaitan dengan masalah yang sebenarnya. Pada posisi demikian, maka konsep jihad telah menjelma menjadi bom bunuh diri, perilaku teror dan semacamnya itu, tidak cukup absah dimaknai sebagaimana yang seharusnya, karena telah berubah menjadi konsumsi berbagai macam orang dengan kepentingan masing-masing. Artinya, apa yang dianggap sebagai "perlaku jihad" akan terlalu naif apabila hanya ditafsirkan dari sudut pandang teologis semata, karena diduga sudah menyentuh persoalan lain yang mungkin politis bahkan ekonomis, dengan ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya pada tataran kepentingan nasional-regional bahkan global-internasional dengan dasar pijakannya masing-masing.

Pada posisi ini, logika *mainstream* pondok pesantren yang diasuh para kiyai akan sulit membenarkan tindakan "membajak" makna jihad itu - meminjam istilah Moeslim Abdurrahman - karena mereka telah mengukuhkan diri untuk senantiasa menampilkan citra keberagamaan yang santun dan menyejukkan pada siapa pun dan kalangan manapun, yaitu agama yang *hanif (al-hanafiyah as-sambah)* yang sarat dengan nilai tasamauh. Selain itu, para santri lebih menekankan tampilnya Islam pada sumber etik dan moral serta landasan kultural dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Teks-Teks Keagamaan Dan Perdamaian
Membaca al-Qur'an dan juga teks-teks keagamaan Islam sama dengan memasuki sebuah supermarket (ini hanya perumpamaan) yang di dalamnya tersedia segala macam barang yang dibutuhkan manusia. Untuk memilih barang tidak begitu saja mengambilnya, melainkan harus terlebih mengetahui barang apa yang akan diambilnya, apa fungsinya, masa berlakunya, made in mana, dan seterusnya. Kesalahan memilih barang akan berakibat fatal dan merugikan, bukan hanya pada pemilih tetapi juga orang lain.

al-Qur'an mempersiapkan segala apa saja yang dibutuhkan umat manusia khususnya kebutuhan spiritual. Ayat-ayat soal perdamaian dapat dengan mudah kita temukan dalam Al-qur'an. Begitu pula

ayat-ayat yang sepintas mengajarkan tindakan kekerasan terhadap orang/pihak lain. Ayat tentang toleransi dan pengakuan keberadaan agama dan keyakinan yang berbeda juga mudah kita temukan begitu juga sebaliknya. Demikian pula ayat tentang keadilan gender dan sebaliknya. Misalnya ayat-ayat Q.S. [6]: 8, Q.S. [2]: 62, 120 dan 190, Q.S. [5]: 82, Q.S. [22]: 17, Q.S. [109]: 6, Q.S. [22]: 39, [9]: 29.

Dalam riwayat *Tsa'labi* yang bersumber dari Ibnu Abbas dikemukakan bahwa Yahudi Madinah dan kaum Nashara Najran mengharap Nabi saw shalat menghadap kiblat mereka. Ketika Allah SWT membelokkan kiblat itu ke arah Ka'bah, mereka merasa keberatan. Mereka berkomplot dan berusaha agar Nabi saw menyetujui kiblat sesuai dengan agama mereka. Maka turunlah ayat di atas (Q.S. 2: 120) yang menjekaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada Nabi Muhammad saw walaupun keinginannya dikabulkan.

Dalam *asbabu al-nuzul* ditemukan satu jawaban bahwa yang dimaksud Yahudi dan Nasrani adalah Yahudi Madinah dan Nasrani Najran. Apakah mereka masih memiliki keinginan sebagaimana Yahudi Madinah dan Najran. Huruf 'I'an' dalam ayat ini memberikan kemungkinan bahwa kebencian kaum Yahudi madinah dan Nasrani Najran bisa jadi bersifat temporal tidak berlangsung selamanya. Sebab huruf *ian* "*ia tufidu taukida an-nafyi wala ta'bidahu*". Jadi bisa jadi yahudi dan Nasrani saat ini tidak lagi membenci agama kaum muslimin sebagaimana Yahudi Madinah dan Nasrani Najran saat itu.

Demikian pula ayat perang (al-Baqarah, 2: 190) difirmankan berkenaan dengan "perdamaian Hudaibiyah", yaitu ketika Rasulullah saw dicegat oleh kaum Quraisy untuk memasuki Baitullah. Adapun isi perdamaian tersebut antara lain agar kaum Muslimin menunaikan umrahnya pada tahun berikutnya. Ketika Rasulullah saw beserta shahabatnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan umrah pada tahun sesuai dengan yang dijanjikan, para shahabat khawatir kalau-kalau orang-orang Quraisy tidak menepati janjinya, bahkan memerangi dan menghalangi mereka masuk di Masjidil Haram, padahal kaum muslimin enggan melakukan peperangan pada bulan-bulan haram (dirwayatkan oleh al-Wahidi dari al-Kalbi, dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas).

Jadi perintah berperang "*wa qatilu fi sabilillahil ladzina...*" (Q.S. 2: 190) sampai (Q.S. 2: 193) memberikan izin berperang sebagai upaya membalas serangan musuh, orang-orang kafir Quraisy. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *qita l(jihad qitali)* dalam al-Qur'an bersifat *difa'i* (tindakan defensif) bukan ofensif-represif (memulai terlebih dulu).

Wazan "*qaatala*" yang digunakan al-qur'an mendukung kesimpulan ini.

Alhasil, teks-teks pesantren hasil ijtihad ulama'-ulama' terdahulu yang berpotensi menimbulkan potensi konflik, diskriminatif dan menyimpang dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang damai, berkeadilan, demokratis dan berspektif kesetaraan manusia dihadapan Allah, harus segera diijtihadi ulang untuk menampilkan wajah Islam yang benar-benar "*rahmatan lil alamin*".

Menurut al-Qur'an *Islam* bukanlah sekedar sebuah nama yang diberikan kepada suatu sistem keyakinan atau agama, tetapi juga nama tindakan pasrah kepada kehendak Tuhan. Segala yang pasrah kepada kehendak secara sukarela atau terpaksa pun disebut *Muslim*. Al-Qur'an menegaskan tidak ada paksaan dalam beragama. Ini merupakan salah satu prinsip unik al-Qur'an yang dimaksudkan untuk mengatur kebebasan beragama dalam Islam, ini disebutkan dalam Q.S. [2]: 256, Q S. [18]: 20, Q.S. [10]: 99.

Sejumlah penafsir mengutip beberapa peristiwa yang di dalamnya Nabi mengimplementasikan ketentuan dalam sura al-Baqarah: 256, dan melarang sahabatnya memaksa orang agar menerima Islam. Thabari, misalnya, menyebutkan bahwa ketika dua suku Yahudi Qainuqah dan Nadir diusir dari Madinah, mereka memiliki tanggungan atas anak-anak Ansar yang telah di tempatkan bersama keluarga Yahudi. Orangtua mereka meminta izin kepada Nabi agar mengambil kembali anak mereka dan membesarkan mereka sebagai Muslim, tetapi Nabi menjawab, "tidak ada paksaan dalam beragama."

Ayat ini sendiri berperan sebagai hukum guna melindungi kebebasan beragama sepanjang sejarah Islam. Perintah al-Qur'an seperti itulah yang menjadi alasan bagi toleransi keagamaan yang menjadi ciri sejarah Islam. Oleh karena itu, penganiayaan terhadap penganut agama lain nyaris tidak pernah terjadi. Namun, bukan merupakan hal yang tepat jika menyatakan bahwa kaum Muslim menganggap agama Yahudi dan Kristen seautentik Islam dalam menuju kebenaran. Seperti semua agama dan ideologi, Islam dalam memandang dirinya lebih unggul ketimbang agama lain saat memaparkan kebenaran. Akan tetapi, yang membuat Islam berbeda dengan agama dan ideologi lain adalah ia bersikap toleran terhadap eksistensi agama lain *ketika berkuasa*. Dampak dari prinsip ini adalah bahwa, meskipun telah berkuasa selama sekitar seribu tahun atas orang Kristen dan Yahudi, Islam tidak mendorong suatu Islamisasi sitematis. Seperti agama lain, Islam pun mendakwahkan keyakinannya, tetapi yang membedakan dengan agama lain bahwa ia tidak membentuk organisasi atau institusi bagi

dakwahnya. Dalam sejarahnya, Islam tidak memiliki kelompok misionaris. Tugas dakwah selalu tidak terorganisasi secara sistematis. Ini berbeda dengan agama Kristen yang memiliki organisasi yang rapi dalam melaksanakan misinya.

Di samping ayat-ayat yang menunjukkan bentuk 'Pluralisme Islam', ada juga beberapa ayat yang menunjukkan eksklusivisme Islam. Dalam konteks ini, al-Qur'an menyatakan, *Agama di sisi Tuhan adalah Islam* (Q.S. Ali 'Imran [3]: 19). *Siapa saja yang mencari agama selain Islam, tidaklah akan diterima; di akhirat ia akan tergolong ke dalam orang-orang yang kehilangan (semua kebaikan spiritual)* (Q.S. Ali 'Imran [3]: 85).

Akan tetapi, hal yang menarik di sini adalah bahwa ayat-ayat yang menunjukkan sikap eksklusif dalam Islam bersifat ambigu dan terbuka untuk ditafsirkan. Ayat-ayat tersebut bisa ditafsirkan, baik dari perspektif pluralisme Islam maupun eksklusivisme Islam. Ayat-ayat ini bisa ditafsirkan bahwa Islam berarti *istislam*, yakni sikap pasrah kepada kehendak Allah; yang tidak dimaksudkan untuk menunjuk pada wahyu Al-Qur'an tertentu.

Gagasan Islam tentang keselamatan tidak dapat disamakan dengan pembebasan Buddha atau pencerahan atau keselamatan Kristen. Gagasan Islam tentang keselamatan sesungguhnya sangat sederhana dan tidak rumit. Islam percaya bahwa manusia dilahirkan ke dunia sebagai *tabula rasa*, tanpa dosa, tetapi dengan keagamaan bawaan (*fitrah*). Dalam pengertian ini, *fitrah* merupakan kemampuan yang telah diciptakan Allah dalam diri manusia untuk mengenal Allah. Inilah bentuk alami yang dengannya seorang anak tercipta dalam rahim ibunya, sehingga dia mampu menerima agama yang hak.

D. Basis Teologi Multikulturalisme

Sebagai risalah profetik, Islam pada intinya adalah seruan pada semua umat manusia, termasuk mereka para pengikut agama-agama, menuju satu cita-cita bersama kesatuan manusia (*unity of humankind*) tanpa membedakan ras, warna kulit, etnik, kebudayaan dan agama. Karena umat manusia tak ubahnya waktu, keduanya maju tak tertahankan. Dan sama seperti tak ada jam tertentu yang mendapat kedudukan khusus, begitu pula tak ada satupun orang, kelompok, atau bangsa manapun yang dapat membanggakan diri sebagai diistimewakan Tuhan (*the chosen people*). Ini dapat berarti bahwa dominasi ras dan diskriminasi atas nama apapun merupakan kekuatan antitesis terhadap tauhid, dan karenanya harus dikecam sebagai kemusyrikan dan sekaligus kejahatan atas kemanusiaan. Pesan kesatuan ini secara tegas disinyalir al-qur'an "katakanlah: Wahai semua penganut agama (dan kebudayaan)! Bergegaslah menuju dialog dan perjumpaan

multikultural (*kalimatun sawa*) antara kami dan kamu".

Dialog bukan semata percakapan bahkan juga pertemuan dua pikiran dan hati mengenai persoalan bersama, dengan komitmen bersama yang tujuannya agar setiap partisipan dapat belajar dari yang lain sehingga dapat berubah dan berkembang. "Berubah" artinya dialog yang terselenggara secara terbuka, jujur dan simpatik dapat membawa kesaling-sepahaman (*mutual understanding*) melalui mana prasangka, stereotip, dan celaan dapat dikurangi dan dieliminir. Dikatakan "tumbuh" karena dialog mengantarkan setiap partisipan memperoleh informasi, klarifikasi dan semacamnya dari sumber primer dan dapat mendiskusikannya secara terbuka dan tulus. Dialog merupakan pangkal pencerahan nurani dan akal pikiran (*tanwir al-quuib wa al-'uqul*) menuju kematangan cara beragama yang menghargai "kelainan" (*the otherness*). Dengan demikian "alimatun sawa" adalah menyangkut cara manusia melakukan perjumpaan dengan dan memahami diri sendiri dan dunia lain (*the other*) pada tingkat terdalam (*from within*), membuka kemungkinan-kemungkinan untuk menggali dan menggapai selaksa makna fundamental kehidupan secara individual dan kolektif dengan berbagai dimensinya.

Dengan toleransi, pluralitas dan perbedaan dipandang sebagai sunnatullah yang tidak akan pernah berubah sekali dan selamanya. Karena merupakan kodrat Tuhan dan kenyataan kehidupan yang tak terbantahkan, toleran terhadap pluralitas dan perbedaan menghendaki pula sikap saling memahami (*mutual understanding*) dan saling menghargai (*mutual respect*).

Al-Quran surah Alhujurat: 13, setidaknya mengandung tiga prinsip utama berkaitan dengan hidup dalam keragaman dan perbedaan. Pertama, *prinsip plura is usual*. Yakni, kepercayaan dan praktik kehidupan bersama yang menandakan kemajemukan sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak perlu diperdebatkan apalagi dipertentangkan. Keragaman cara berpikir dan cara bertindak umat manusia dalam konteks ruang dan waktu selalu dan selamanya akan terus eksis. Keberbedaan – apakah dalam agama dan kebudayaan – selalu saja hadir memberi nuansa dan spektrum kehidupan yang tidak monoton, ia selalu dinamis dan dialektis. Dengan demikian, Islam tidak mengenal kejumudan dan dogmatisme. Karena keduanya mengingkari kenyataan bagi kemungkinan-kemungkinan terbukanya kebenaran dari pintu manapun yang bisa diakses oleh orang beriman. Sebagaimana nasihat Ya'qub terhadap putra-putranya: "Dan Ya'qub berkat: "Hai anak-anakku janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu, dan masuklah dari pintu-pintu yang berlainan".

Kedua, prinsip *equal is usual*. Ayat tersebut merupakan normatifitas bagi kesadaran baru umat manusia mengenai realitas dunia yang plural. Kesadaran ini bukan hanya karena manusia telah mampu melihat jumlah etnis dan bangsa yang sangat beragam di dunia ini. Namun kesadaran itu telah mengalami perkembangan sesuai dengan episteme zamannya. Bila kesadaran pluralisme modern memahami keragaman sebagai akibat langsung perubahan sosial yang diarahkan oleh semangat pembangunan dan modernisasi, kesadaran postmodern menandai keragaman sebagai suatu kenyataan yang *taken for granted* diakui eksistensinya. Kesadaran pertama pada hakikatnya cenderung mengarah pada penyeragaman wacana dalam berbagai bidang kehidupan dan mengalami kesulitan dalam melakukan dialog.

Kesadaran lain mempunyai karakteristik antara lain: kerangka kerja teologi pluralis memusatkan diri pada kepercayaan bahwa realitas mutlak secara esensial tetap beragam. Pluralisme berarti penghargaan terhadap sistem keimanan agama atau kebudayaan lain. Pluralisme mengajak pada agama-agama (dan kebudayaan-kebudayaan) untuk berpindah dari pemusatan atas “diri” kepada “Yang Suci” untuk mengeliminir perbedaan-perbedaan yang ada dan menumbuhkan ko-eksistensi. Secara perennial, perbedaan-perbedaan hanya tampak pada level eksoteris, namun dapat bertemu pada satu titik yang sama, yakni dunia yang syarat pesona esoterisme. Budhy Munawar Rahman dengan cermat menggarisbawahi, bahwa pluralisme tidak semestinya dipahami sekadar sebagai kebaikan *negative (negatif good)* yang semata-mata hanya dipandang dari sisi kegunaannya untuk mengikis primordialisme, fanatisme dan radikalisme. Namun lebih dari itu, pluralisme adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*civility*), bernilai positif dan merupakan rahmat.

Seorang multikulturalis, menurut Islam, perlu menunjukkan sikap-sikap positif dalam konteks relasi antar manusia. Relasi yang manusiawi ditandai dengan kerjasama untuk saling menjaga perasaan dan kepercayaan. Kecurigaan dan khianat merupakan titik awal yang buruk dalam membangun komunikasi lintas batas. Sebaliknya, senantiasa berprasangka baik (*husmuzhan*), memenuhi janji dan memelihara kepercayaan (*ri'ayah al-'ahd wa al-amanah*) sangat ditekankan.

Baik prasangka maupun janji dan amanah, keduanya tidak semata berhubungan dengan relasi horizontal antar manusia, bahkan juga hubungan vertikal dengan Tuhan. Berprasangka baik pada manusia berarti tidak memvonis dan selalu mengedepankan klarifikasi (*tabayyun*) dalam kehidupan masyarakat yang plural, sementara

berprasangka baik pada Tuhan adalah tidak mencera nasib manusia yang berjalan sesuai dengan ketetapan-Nya dalam sunnatullah. Al-'ahd meliputi sesuatu yang dijanjikan manusia kepada Tuhan dalam rangka untuk mentaati segala perintah-Nya seperti shalat, nadzar dan sebagainya; juga sesuatu yang dijanjikan pada sesama manusia baik berupa perkataan maupun perbuatan seperti akad, janji dan pemberian. Sedangkan al-amanah adalah sesuatu yang dipercayakan oleh Allah pada manusia seperti ta'lif syari'ah, atau kepercayaan manusia pada sesamanya seperti penitipan harta (*wadi'ah al-ammwal*) dan sebagainya. Dari segi ruang lingkupnya, amanah meliputi segala hubungan antarmanusia dalam persoalan muamalah baik dalam aspek ekonomi (*maliyah*), perkara kontrak dan etika sosial (*al-adabiyah al-ijtima'iyah*) serta persoalan kontrak politik dan perang. Amanah dalam ranah kontemporer mengalami perkembangan pemaknaannya, yakni sikap saling percaya (*mutual trust*) yang didasarkan pada spirit profesionalitas, meritokrasi, dan akuntabilitas di hadapan publik dan secara moral pada hati nurani dan Tuhan.

Menepati janji dan menjaga kepercayaan (*mutual trust*) orang lain adalah suatu kebutuhan bagi terwujudnya kehidupan harmoni. Karena pentingnya dua masalah ini, Rasulullah pernah menekankan bahwa pengingkaran atas amanah dan janji adalah salah satu tanda orang tidak beriman, tanda orang tidak beragama, atau tanda orang munafik. Dalam maknanya yang sederhana, harmoni adalah menghargai komitmen dan janji personal. Bentuk transaksi dan kontrak apapun yang terjadi antara dua orang atau lebih mensyaratkan adanya saling percaya (*mutual trust*). Tiada akad atau kontrak tanpa amanah. Sebagian ulama memberikan interpretasi yang cukup luas tentang ajaran al-Qur'an mengenai menepati janji dan amanah. Menepati janji dan amanah adalah bentuk dari pertemuan antara kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) dan kewajiban agama seseorang (*fard al-'ayn*). Manusia wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ia juga punya kewajiban terhadap keluarga, tetangga dan masyarakat. Membuang limbah industri misalnya, berarti membuat lingkungan hidup tercemar, mengganggu keseimbangan sistem ekologis dan ini bertentangan dengan kewajiban terhadap masyarakat, karena itu menghalangi tercapainya langkah masyarakat menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Masyarakat tidak dapat mencapai tujuan tertingginya (*summum bonum*) hingga penduduknya memenuhi perjanjian dan amanah yang mereka buat sendiri.

Muslim menegaskan, multikulturalis memandang Islam sebagai agama egalitarian sekaligus terbuka atas solidaritas dan ketergantungan sosial (*takafil, ta'awun*). Islam mengakui secara gamblang hak semua manusia untuk hidup secara layak dan jaminan

kesehatan, pakaian, makanan, perumahan serta usaha-usaha sosial yang diperlukan. Islam juga menekankan hak setiap orang atas jaminan sosial di waktu mengalami pengangguran, sakit, cacat, janda/duda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain karena keadaan di luar kekuasaannya. Standar hidup semacam ini hanya mungkin dalam sebuah tatanan sosial yang sehat, di mana individu-individu dan kelompok-kelompok yang sangat plural saling memelihara hubungan sosial kuat. Dapatkah orang merasa aman tanpa ikatan, kohesi dan solidaritas sosial? Uang dapat membeli apapun, tapi pengangguran, sakit, ketidakmampuan, duda/janda, lanjut usia atau kekurangan lainnya memerlukan lebih dari sekedar uang sebagai solusi. Ini menuntut agar semua orang bertanggung jawab dan saling berkorban satu terhadap yang lain, agar mereka menciptakan bersama sebuah masyarakat yang saling berbagi – satu untuk semua, semua untuk semua. “Dan tolong-menolonglah kamu dengan rela saling berkorban (*birr*) dan memelihara solidaritas dan ikatan sosial (*taqwa*), dan janganlah kamu tolong – menolong dalam berbuat kriminal dan konflik komunal. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat samsi sosialnya”.

Secara etimologis, Islam berasal dari kata *salima* yang berarti ketenangan, keselamatan, keamana, harmoni, kebebasan dari unsur-unsur yang mengganggu, dan kedamaian dalam penyerahan diri. Spirit nirkekerasan dan perdamaian adalah inti dari Islam itu sendiri. Islam adalah sebuah tradisi perdamaian dan harmoni yang hidup (*living tradition of peace and harmony*), suatu totalitas sistem tradisi yang hidup penuh damai dan harmoni dengan Tuhan (*hablun min Allah*), dengan diri sendiri dan sesama (*hablun min an-nas*) dan dengan lingkungan (*hablun min al-'alam*). Harmoni adalah ta'aluf, yakni keakraban (*familiarity*), kekariban, kerukunan dan kemesraan (*intimacy*), dan saling pengertian (*understanding*). Harmoni juga *tawafuq*, yaitu persetujuan, permufakatan, perjanjian (*agreement*) dan kecocokan, kesesuaian, keselarasan (*conformity*). Jadi, Islam adalah agama damai dan harmoni, dan setiap yang meyakini Islam disebut Muslim. Muslim sejati tidak akan menjadi fanatic, bahkan sebaliknya ia cinta damai, mengedepankan harmoni dan rasa aman bagi semua makhluk.

Banyak cara untuk memaknai perdamaian. *Pertama*, pembangun perdamaian adalah nama bagi mereka yang mempunyai kepedulian untuk membangun rasa percaya (*trust*) yang bertujuan mengurangi salah persepsi dan stereotif. Pembangun perdamaian juga dilakukan untuk memudahkan peningkatan hubungan dengan mendorong kelompok-kelompok bertikai supaya berpartisipasi dalam proyek dan program bersama. Pembangun perdamaian mengarah pada faktor-faktor yang

fundamental dalam hubungan antara pihak-pihak dan terpusat pada struktur-struktur perdamaian yang memupus sebab-sebab konflik dan menawarkan alternatif-alternatif resolusi terhadap konflik dalam situasi yang potensial mengarah pada kekerasan. *Kedua*, pemeliharaan perdamaian yang umumnya bertalian dengan upaya bersenjata dan bersifat memisahkan kelompok-kelompok yang berselisih. *Ketiga*, penciptaan perdamaian sebagai upaya menerapkan pendekatan resolusi konflik (*sulh, islah*), dengan penekanan pada para pelaku dan perasaan mereka tentang kewajiban moral dan komitmen. Penciptaan perdamaian juga digunakan dalam kaitannya dengan aksi-aksi nirkekerasan; juga sebagai jenis campur tangan tanpa senjata dalam situasi konflik kekerasan atau mengarah pada kekerasan.

Resolusi konflik dalam khazanah Islam lebih dikenal dengan istilah *sulh*. Tindakan ini menekankan hubungan erat antara dimensi-dimensi psikologis dan politik kehidupan komunal melalui pengakuan bahwa luka-luka yang diderita oleh individu-individu dan kelompok akan membusuk dan meluas jika tidak dipahami, diperbaiki, dimaafkan, dan diatasi. Untuk alasan ini, resolusi konflik dipergunakan untuk mencapai rekonsiliasi atas permusuhan berdarah, horor kejahatan, dan kasus-kasus pembunuhan.

Sulh adalah sebuah istilah penting baik dalam kosa kata hukum Islam maupun bahasa kebiasaan suku. Menurut Syari'ah Islam, tujuan *sulh* adalah untuk mengakhiri konflik dan perselisihan di antara orang-orang beriman sehingga mereka dapat menciptakan hubungan dalam kedamaian dan persahabatan. Dalam hukum Islam, *sulh* adalah sebetuk kontrak yang secara legal mengikat pada tingkat individu dan komunitas. Tradisi ini tidak hanya tumbuh pada masa Islam, bahkan merupakan warisan yang sudah ada sejak masa pra Islam dan para pewarisnya adalah suku-suku badui di jazirah Arab. Karena ada dimensi-dimensi positif dari tradisi ini Islam mengadopsinya kembali dengan melakukan pengembangan dan pemberian semangat tauhid. Proses *sulh* menempati posisi penting sebagai keputusan terbaik. Dari segi katanya itu sendiri, istilah *sulh* digunakan dengan dua pengertian, yakni keadilan restorative (*restorative justice*) dan penciptaan perdamaian serta hasil atau kondisi aktual yang dilahirkan oleh proses tersebut.

Menurut Abu Hasan, ada dua tipe proses *sulh*: *sulh public* (*public sulh*) dan *sulh pribadi* (*private sulh*). Yang pertama serupa dengan fakta perdamaian antara dua Negara yang tujuannya untuk “gencatan senjata dan penangguhan pertempuran antara dua kelompok dan membangun kedamaian,” yang disebut *muwada'ah*, selama periode tertentu. Proses ini juga

bisa terjadi karena konflik antara dua atau lebih suku yang mengakibatkan kematian dan kerusakan yang berdampak pada semua kelompok yang bertikai.

Ada dua peristiwa penting dalam hidup Nabi yang menggambarkan bahwa ia adalah seorang yang menghargai jalan damai daripada konflik dan kekerasan. *Pertama* berkaitan dengan masa pra kenabiannya, suatu fase penting yang menyebabkannya dijuluki dengan gelar *al- Amin* (orang yang terpercaya dan rekonsiliator). Peristiwa ini bermula dari pembangunan kembali ka'bah, sebagai rumah Allah yang telah didirikan oleh Ibrahim dan menjadi tempat suci bagi tradisi agama-agama monoteisme (*hanfiyah samhah*). Di dalam ka'bah terdapat batu hitam suci yang disebut Hajar Aswad.

Ka'bah dibangun kembali karena rusak terkena banjir besar. Karena ka'bah adalah tempat suci bagi seluruh suku yang ada di Makkah pada saat itu, maka pembangunan ini juga melibatkan seluruhnya. Mereka bekerjasama dan saling bahu untuk menegakkan kembali bangunan ini. Namun, konflik mulai terjadi di antara suku-suku itu ketika Hajar Aswad hendak diletakkan. Setiap suku mengklaim paling berhak untuk menempatkannya kembali sembari mengabaikan keberadaan suku-suku lainnya. Hampir saja peristiwa ini menyulut pertumpahan darah. Atas kebijakan seseorang yang dipandang tertua di antara mereka, lalu diambillah suatu kesepakatan, yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya adalah dia yang datang paling awal melalui Bab al-Shafa pada esok harinya. Ternyata, Muhammad adalah orang pertama yang memasuki gerbang tersebut.

Dengan ketulusan dan kejujurannya, Muhammad menunjukkan sikap yang bisa diterima oleh semua suku. Ia tidak mempergunakan haknya untuk kepentingannya sendiri, atau kepentingan sukunya Bani Hasyim. Muhammad dengan arif membuat jalan keluar yang baik untuk semua. Ia meletakkan sebuah jubah besar di atas tanah dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah jubah tersebut. Ia memerintahkan kepada semua kepala suku agar memegang ujung-ujung jubah, kemudian mengangkatnya secara bersama-sama sampai ke tempat yang dimaksud, dan Muhammad kemudian meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Dengan keputusan ini, pembangunan Ka'bah dapat berlanjut dan konflik dapat didamaikan.

Kedua, peristiwa penting penaklukan Makkah oleh Nabi Muhammad dan pasukannya yang setia. Setelah selama delapan tahun berjuang dan berperang dengan penduduk Makkah, ia kembali dengan sepuluh ribu tentara menuju Makkah. Penduduk Makkah mengira bahwa Muhammad akan melakukan balas dendam atas semua tindakan kejahatan dan

kekerasan yang pernah dilakukan mereka kepadanya dan umatnya. Mereka juga menduga akan diusir oleh Muhammad sebagaimana mereka pernah mengusirnya hingga hijrah ke Madinah. Mereka dalam ketakutan luar biasa, seolah kematian sudah diurat leher.

Kembali Muhammad menunjukkan teladan utama dengan sifat terpuji. Ia berkata kepada penduduk Makkah dengan kata-kata yang pernah diucapkan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang pernah berbuat salah dan menemuinya di Mesir: "Sesungguhnya aku berkata seperti yang diucapkan saudaraku Yusuf: pada hari ini tidak ada celaan dan dendam yang ditimpakan atas kalian. Tuhan akan mengampuni kalian, dan Dialah yang maha penyayang diantara penyayang". Sebuah peristiwa penaklukan tanpa cucuran darah dan derai air mata orang-orang tak berdosa.

Peristiwa ini menggambarkan paradigma penciptaan perdamaian yang diperoleh dari praktik Muhammad ketika ia sama sekali tidak memiliki kekuasaan politik: yakni kesabaran, penghargaan atas martabat kemanusiaan universal, berbagi bersama, dan kreativitas dalam resolusi konflik. Pada peristiwa penaklukan Makkah ada nilai utama yang disampaikan oleh Islam melalui Nabi, yakni bahwa perdamaian tidak akan pernah terwujud tanpa pengampunan atau memaafkan. Pemberian ampun atau maaf dalam rekonsiliasi adalah tindakan tepat dalam situasi konflik. Ini tidak hanya praktik Nabi Muhammad.

Pandangan moral al-Qur'an secara tegas memberikan pesan bahwa kekuasaan Tuhan memberi ampunan seyogyanya menjadi sifat kemanusiaan dalam relasi satu dengan yang lain; ampunan-Nya membawa pada perbaikan harga diri yang dapat menciptakan relasi antar manusia yang lebih sejuak. Memaafkan dan memberi ampunan berarti melupakan semua serangan, kejahatan, perbuatan salah dan dosa yang dilakukan orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja terhadap anda, seperti mencerca melalui lisan, mengambil atau merampas hak milik anda. Memaafkan itu ada dua macamnya. *Pertama*, memaafkan seseorang ketika kita tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan pembalasan. Memaafkan seperti ini pada dasarnya serupa dengan kesabaran dan menahan diri, dan bukan memberikan maaf. Dengan kata lain, ia adalah semacam ketidakberdayaan dan kelemahan, semacam toleransi. *Kedua*, kita memaafkan seseorang ketika kita memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melakukan balas dendam.

TEMUAN PENELITIAN

A. Pesantren Pancasila Selayang Pandang

Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu diresmikan tanggal 18 Nopember 1974 oleh Menteri Agama RI.

Prof. Dr.H. Mukti Ali, MA. mewakili Presiden RI ke 2 H. Muhammad Soeharto. H. Muhammad Soeharto mengamanatkan kepada Menteri Agama agar pondok yang diresmikan diberi nama " Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu". Modal awal pembangunan Pondok ini berasal dari masyarakat Kelurahan Jembatan Kecil berupa tanah wakaf seluas ± 9 Ha (sekarang tinggal ± 6 Ha) dan uang bantuan Presiden Soeharto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Pemda Provinsi (Gubernur H. Ali Amin, SH) pada waktu kunjungan beliau ke Bengkulu tahun 1972.

Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu yang luasnya 6 hektar ini letaknya sangat strategis, yaitu di tengah kota Bengkulu, tepatnya Jl. Rinjani Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Telp. (0736) 20262. Berdirinya Pondok ini dilatar belakangi oleh keinginan kuat para sepuh/kiyai dan masyarakat Bengkulu untuk memiliki sebuah lembaga pendidikan Islam yang bertujuan mencetak kader-kader muslim, berilmu pengetahuan dan mempunyai keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada awal berdirinya, Pondok Pesantren Pancasila dipimpin oleh seorang Kiyai yang Kharismatik, yaitu K.H. Nawawi, beliau alumni Darul Ulum Makkah, Karena faktor usia (K.H. Nawawi sudah sepuh) beliau mengundurkan diri. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Ustadz H. Muhammad Rusly sebagai direktur, alumni Pondok Pesantren Candung Sumatera Barat. Adapun wakil direktornya K.H. Ahmad Daroini, alumni pondok Pesantren Kerapyak Jogjakarta. Karena kesibukan H. Muhammad Rusly di DPR maka Pondok Pesantren Pancasila dipimpin oleh Prof. Dr. K.H. Djamaan Nur sebagai Direktur dengan wakil Ustadz. Yakin Sabri. HS. Karena adanya gejolak, akhirnya pihak yayasan memberhentikan Prof. Dr. K.H. Djamaan Nur dan Ustadz. Yakin Sabri. HS dari kepemimpinan Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu dan mengangkat Drs. H.M. Asy'ari Husein sebagai direktur, Rozian Karnedi, M. Ag sebagai wakil direktur.

Pada awal berdirinya (1974) Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu memiliki satu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 untuk MTs (Madrasah Tsanawiyah) dan kelas 5 sampai dengan kelas 6 untuk MA (Madrasah Aliyah). Baru pada tahun 1977 dibentuk menjadi dua jenjang pendidikan yaitu MTs setingkat SMP dan MA setingkat SMA. Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu terus berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan pendidikan, pada tahun 1987 mendirikan sekolah umum tingkat SMP dan SMA. Saat ini Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu memiliki santri 395 orang putra/putri.

Kurikulum Pondok yang digunakan untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SLTP disebut dengan *Takhassus Dinniyyah 'Ula*. Sedangkan untuk tingkat Madrasah Aliyah (MA) dan SMA disebut dengan *Takhassus Dinniyyah Wustho*. Adapun Jumlah Ustadz/Guru di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu sebanyak 83 orang dan didukung oleh 18 orang tenaga Tata Usaha. Secara fisik bangunan yang ada masih harus terus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitas. Saat ini Pondok telah memiliki laboratorium, seperti: laboratorium bahasa, biologi dan fisika dan dilengkapi dengan alat-alat teknologi sebagai penunjang pendidikan. Selain itu, masing-masing sekolah memiliki perpustakaan sendiri. Pada tahun 2001 – 2003, Pondok Pesantren Pancasila mendapatkan bantuan dari Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan dana Loan IDB Jeddah, dalam bentuk sarana gedung dan alat laboratorium komputer, bahasa, biologi, kimia, fisika dan buku-buku perpustakaan.

Pada awal berdirinya, organisasi kelembagaan yang ada di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu masih sangat sederhana, bahkan menurut K.H. A. Daroini saat itu belum ada istilah lurah pondok, perlahan organisasi di pondok Pesantren Pancasila mulai dibenahi, dengan struktur Pimpinan Pondok, Wakil Pimpinan, Kepala TU dan Lurah Asrama. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, saat ini Pondok Pesantren Pancasila telah memiliki organisasi kelembagaan yang memadai. Saat penelitian ini dilakukan, direktur pondok pesantren Pancasila dijabat oleh Drs. H. M. Asy'ari Husein, dan Wakil Direktur : Rozian Karnedi, M. Ag.

B. Informasi Dan Pemikiran Informan

KH. A. Daroini, adalah Lurah Pondok Pesantren Pancasila yang kesehariannya dekat dengan santri. Ketika ditanya soal "bagaimana penanaman nilai-nilai multikulturalisme kepada santri di pesantren" beliau menjelaskan bahwa pada awal beliau mengajar di Pondok Pesantren Pancasila (1979) belum dibahas masalah multikultural, mengingat masalahnya ketika itu belum mengemuka. Perkembangan terakhir, setelah masalah multikulturalisme muncul kepermukaan, maka multikultural diajarkan kepada santri melalui khutbah jum'at, muhadharah, dan kesempatan lain. Pembelajaran di kelas hanya disampaikan jika kebetulan materi yang dibahas menyangkut ayat-ayat yang berkaitan dengan multikulturalisme.

Ketika beliau menjelaskan Q.S. al-Hujurat: 13, beliau katakan "*lita'arafu*" itu tidak hanya sekadar saling kenal mengenal, tetapi lebih dari itu, mengenali orang yang ada dihadapannya bahwa dia adalah manusia yang satu keturunan dengan kita dari Adam dan Hawa. Mengenali orang yang ada

dihadapan kita adalah orang yang dapat menolong kita, sah-sah saja. Mengenali bahwa orang yang ada dihadapan kita itu adalah orang yang bisa bekerjasama bisnis dengan kita, kalau mau membeli mobil tidak perlu ditanya yang punya mobil orang Islam atau bukan, sama dengan kita akan menjual getah karet tidak perlu ditanya yang mau membeli karet orang Islam atau bukan, yang penting orang mau membeli karet dan kita menjual karet, tanpa harus datanya agamanya. Orang yang ada dihadapan kita adalah orang yang perlu kita tolong atau tidak perlu. Agama bukan menghalangi "*lita'arafu*" tetapi makin apiknya hubungan sesama manusia, meskipun tidak berada dalam satu naungan agama.

Dalam salah satu teks khutbahnya, KH. A. Daroini menjelaskan bahwa ajaran Islam sangat menganjurkan kepada seluruh umat manusia di permukaan bumi ini tanpa adanya batasan apapun sepanjang kita tidak dizolomi.

Dalam ayat 13 surat al-Hujurat, pada dasarnya menyadarkan kita untuk bersikap saling hormat menghormati setelah kita saling mengenal. Kadang-kadang suatu bangsa karena sesuatu dan lain hal sangat membutuhkan bantuan kita. Mereka tidak bisa menghasilkan karet, tidak pula bisa bertanam kelapa sawit ataupun kopi coklat karena komoditi itu hanya tumbuh di daerah seperti tanah air kita ini padahal mereka sangat membutuhkan. Sebaliknya, tidak bisa dipungkiri mesin-mesin pesawat, mesin-mesin kapal, mesin-mesin pabrik sudah diproduksi secara besar-besaran oleh bangsa tertentu sementara kita belum mampu membuatnya padahal mesin-mesin itu sangat kita butuhkan untuk kepentingan bangsa tercinta ini.

Rozian Karnedi, M. Ag., adalah Wakil Direktur Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu. Saat diwawancarai tentang kapan para santri diberikan paham multikulturalisme? Karnedi menjawab bahwa paham kulturalisme diberikan kepada santri tidak secara klasikal saat mereka belajar, tetapi melalui kegiatan muhadharah, kuliah subuh, dan tausiyah. Pada saat natal para santri diberikan pemahaman tentang multikultural terhadap agama orang lain dan tetap menjalin persahabatan. Artinya, materi multikultural tidak terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah. Sejauh ini Pondok Pesantren Pancasila belum ada niatan untuk mengintegrasikan materi multikulturalisme ke dalam kurikulum sekolah, kecuali jika ada petunjuk dari pemerintah.

Ketika memaknai al-Qur'an Surat al-Kafirun "*lakum dinukum waliadin*" Karnedi mengatakan bahwa ayat ini lebih menekankan kepada "aqidah" dan "ibadah" sehingga tidak ada toleransi dalam urusan ini, karenanya tidak diperbolehkan umat Islam mengikuti ritual natal dan perayaan palentin. Jika masalahnya muamalaah atau membangun pergaulan, berarti sudah di luar kenteks ayat tersebut.

Adapun kitab-kitab yang agak banyak membicarakan masalah multikultural adalah tafsir-tafsir kontemporer, seperti al-Manar. Secara jelasnya belum ditemukan pada kitab apa multikultural itu dibahas secara luas dan detil. Menyinggung masalah jihad, Karnedi menjelaskan bahwa ketika berperang Rasulullah saw "melarang membunuh wanita dan anak-anak" dan "melarang menebang pohon yang sedang berbuah".

Hanafie Taufik, BA., adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs), beliau mulai mengajar di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu sejak tahun 1993. Taufik menjelaskan masalah sikap tasamuh sudah ada dalam ajaran Islam. Sikap ini menurut Taufik sangat penting dan sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para santri di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu. Para santri diajarkan sikap saling tenggang rasa, dalam kehidupan masyarakat menumbuhkan sikap saling bantu membantu, karena negara kita ini berdasarkan Pancasila, walaupun agama kita banyak, kita harus bersatu.

Mengenai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ketiga ukhuwah ini tidak bisa dipisahkan, harus sejalan. Kita rukun sesama umat Islam, tetapi dengan umat lain tidak boleh bersiteru. Untuk itu, Peranan Pondok Pesantren Pancasila dalam membentuk kerukunan umat beragama diantaranya melalui kegiatan ceramah atau pengajian kepada masyarakat. Dalam kehidupan santri sudah kita terapkan sikap toleransi, hal itu dibuktikan dengan kondisi mereka yang berlainan daerah, yaitu dari 8 kabupaten yang ada di Bengkulu.

Untuk saat ini, kerukunan umat beragama di provinsi Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Munculnya masalah bukan dari luar agama kita, tapi sesama kita umat Islam hanya karena berbeda pendapat (masalah khilafiyah) dan tidak perlu diperdebatkan, itu yang menyebabkan runtuhnya persatuan umat Islam, yang lebih penting bagaimana membangun hablumminannas secara lebih baik.

Sikap pemerintah sudah baik dengan tidak membeda-bedakan pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya, misalnya dalam pengamanan hari besar agama. Berkenaan dengan jihad, jangan salah kaprah tentang pengertian jihad. Jihad bukan hanya diartikan perang, tapi jihad dapat berupa pengamalan ibadah, berinfak, membangun masjid atau belajar menuntut ilmu, semuanya merupakan bagian dari jihad.

Ustadz Adzhim, adalah tenaga pengajar di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu. Adzhim mulai mengabdikan diri di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu sejak tahun 2000. Menurut Adzhim yang menjadi program unggulan adalah ibadah kemasyarakatan, dan sistem pengajaran yang

disebut dengan "Bandongan" dan "serogan". Bandongan yaitu Ustadz/guru menjelaskan per kata dan santri/murid mendengarkan dan mencatat. Adapun Serogan dimana santri/murid membaca dan menjelaskan sedangkan Ustadz/guru mendengarkannya.

Berkaitan dengan penafsiran surat al-Kafirun ayat: 6, menurutnya bahwa Islam merupakan suatu agama yang "*rahmatan lil'alam*". Manusia harus menghargai keyakinan dalam memeluk agama manapun, tidak ada paksaan dalam beragama. Oleh karena itu, dalam mengajarkan sikap "*tasamuh*" kepada santri berkaitan dengan ayat tersebut, lebih menekankan kepada sikap saling menghormati antar umat beragama, tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang yang sudah beragama.

Islam jelas mengajarkan sikap tasamuh. Sikap ini penting karena kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi kita ketahui di Indonesia banyak agama dan beragam corak suku bangsa. Menanggapi masalah kerukunan antar umat beragama di provinsi Bengkulu, menurutnya hubungan antar umat beragama saat ini sudah sangat baik. Gejala-gejala yang menunjukkan adanya potensi yang akan mengganggu kerukunan umat beragama di Bengkulu belum kelihatan, keadaannya masih kondusif, aman-aman saja.

Ismi Aziz, adalah santri/pelajar SMA Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu kelas III IPA. Menurut Aziz, di Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu sudah diajarkan sikap toleransi beragama kepada umat agama lain. Dirinya mengaku sudah menerapkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari sikap toleransi baik kepada teman sekelas atau teman di lingkungannya. Ia mengaku mempunyai banyak teman yang berlainan agama. Pelajaran tentang toleransi antar umat beragama ia dapatkan dalam mata pelajaran PPKn. Gurunya tidak pernah mengajarkan sikap fanatis, namun juga tetap selalu menjaga aqidah Islam. Kami diajarkan jangan menikah dengan orang yang non muslim, tapi kalau bergaul tidak ada larangan, kami diperbolehkan untuk bergaul dengan siapa saja.

C. Analisis Hasil Penelitian

Jika cermati dengan tajam, penjelasan multikulturalisme yang disampaikan K.H. A. Daroini dan pengelola Pondok Pesantren lainnya, terlihat bahwa ajaran Islam begitu indah, sangat toleran, dan menghargai perbedaan agama. Al-Qur'an Surat al-Hujurat ayat 13, ternyata muatannya tidak hanya sebatas dasar untuk saling mengenal tetapi lebih dari itu, mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, menghargai, menolong, dan bahkan menjalin hubungan bisnis dengan siapapun tanpa harus melihat apa agamanya. Ajaran Islam tidak membelenggu kita, tetapi justru menganjurkan kita

untuk membangun hubungan yang harmoni sesama manusia walaupun berbeda agama.

Sayangnya, nilai-nilai multikulturalisme yang begitu humanistik hanya disampaikan kepada para santri melalui khutbah jum'at, kuliah subuh, muhadharah, dan tausiyah, tidak terintegratif secara formal di dalam kurikulum. Jika materi multikulturalisme terintegrasi dalam kurikulum, para santri dapat mengetahui dan memahami lebih dalam dengan mendiskusikannya kepada Ustadz/Ustadzah yang mengajar di kelas.

1. Model Komunikasi

Pemberian materi "multikulturalisme" kepada santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu tidak terjadual secara formal akan tetapi materi itu disampaikan melalui khutbah jum'at dan muhadharah. Penyampaian melalui khutbah jum'at dan muhadharah sifatnya monologis (satu arah). Kelemahan model ini, santri tidak ada kesempatan untuk bertanya (mendiskusikan) sesuatu yang belum dipahami. Oleh karenanya akan sangat bijaksana jika disampaikan secara dialogis, apalagi terstruktur ke dalam kurikulum. Seperti dikatakan Theo Riyanto:

"Seorang pendidik yang efektif, tidak hanya efektif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas saja (*transfer of knowledge*), tetapi lebih-lebih dalam relasi pribadinya dan "*modeling*" nya (*transfer of attitude and values*), baik kepada peserta didik maupun kepada seluruh anggota komunitas sekolah. Pendidikan yang humanis menekankan bahwa pendidikan pertama-tama dan yang utama adalah bagaimana menjalin komunikasi dan relasi personal antara pribadi-pribadi dan antar pribadi dan kelompok di dalam komunitas sekolah. Relasi ini berkembang dengan pesat dan menghasilkan buah-buah pendidikan jika dilandasi oleh cintakasih antar mereka. Pribadi-pribadi hanya berkembang secara optimal dan relatif tanpa hambatan jika berada dalam suasana yang penuh cinta (*unconditional love*), hati yang penuh pengertian (*understanding heart*) serta relasi pribadi yang efektif (*personal relationship*). Dalam mendidik seseorang kita hendaknya mampu menerima diri sebagaimana adanya dan kemudian mengungkapkannya secara jujur (*modeling*). Mendidik tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, melatih keterampilan verbal kepada para peserta didik, namun merupakan bantuan agar peserta didik dapat menumbuhkembangkan dirinya secara optimal (Riyanto, <http://bruderfic.or.id/h-60/pendidikan-yang-humanis.html> [8/04/2008]).

Mendidik yang efektif pada dasarnya merupakan kemampun seseorang menghadirkan diri sedemikian sehingga pendidik memiliki relasi bermakna pendidikan dengan para peserta didik sehingga mereka mampu menumbuhkembangkan dirinya menjadi pribadi dewasa dan matang. Pendidikan

yang efektif adalah yang berpusat pada siswa atau pendidikan bagi siswa. Dasar pendidikannya adalah apa yang menjadi "dunia", minat, dan kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Pendidik membantu peserta didik untuk menemukan, mengembangkan dan mencoba mempraktikkan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki (*the learners-centered teaching*). Ciri utama pendidikan yang berpusat pada siswa adalah bahwa pendidik menghormati, menghargai dan menerima siswa sebagaimana adanya. Komunikasi dan relasi yang efektif sangat diperlukan dalam model pendidikan yang berpusat pada siswa, sebab hanya dalam suasana relasi dan komunikasi yang efektif, peserta didik akan dapat mengeksplorasi dirinya, mengembangkan dirinya dan kemudian mem "fungsi" kan dirinya di dalam masyarakat secara optimal.

Tujuan sejati dari pendidikan seharusnya adalah pertumbuhan dan perkembangan diri peserta didik secara utuh sehingga mereka menjadi pribadi dewasa yang matang dan mapan, mampu menghadapi berbagai masalah dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Agar tujuan ini dapat tercapai maka diperlukan sistem pembelajaran dan pendidikan yang humanis serta mengembangkan cara berpikir aktif-positif dan keterampilan yang memadai (*income generating skills*). Pendidikan dan pembelajaran yang bersifat aktif-positif dan berdasarkan pada minat dan kebutuhan siswa sangat penting untuk memperoleh kemajuan baik dalam bidang intelektual, emosi/perasaan (EQ), afeksi maupun keterampilan yang berguna untuk hidup praktis. Tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah memanusiakan manusia muda (N. Driyarkara). Pendidikan hendaknya membantu peserta didik untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermanusiawi (semakin "penuh" sebagai manusia), berguna dan berpengaruh di dalam masyarakatnya, yang bertanggungjawab dan bersifat proaktif dan kooperatif. Masyarakat membutuhkan pribadi-pribadi yang handal dalam bidang akademis, keterampilan atau keahlian dan sekaligus memiliki watak atau ketutamaan yang luhur. Singkatnya pribadi yang cerdas, berkeahlian, namun tetap humanis.

2. Pendekatan dan Materi Pendidikan Multikulturalisme

Penanaman paham multikulturalisme (toleransi beragama) bagi santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu belum menjadi prioritas utama dan tidak terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan. Masalah multikulturalisme dibicarakan di luar jam belajar, melalui khutbah jum'at, kuliah subuh, muhadharah, dan taushiyah Kalimatun ditucarakan di dalam jam belajar sifatnya hanya kebutuhan ada ayat-ayat yang muatannya bersesuaian dengan multikultural.

Sistem pendidikan hendaknya berpusat pada peserta didik, artinya kurikulum, administrasi, kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikulumnya, sistem pengelolaannya harus dirumuskan dan dilaksanakan demi kepentingan peserta didik, bukan demi kepentingan guru, sekolah atau lembaga lain. Pendidikan yang hanya memusatkan pada kepentingan kebutuhan kerja secara sempit harus dikembalikan kepada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian peserta didik secara utuh. Seperti misalnya kemampuan bernalar, berpikir aktif-positif, kreatif, menemukan alternatif dan prosesnya menjadi pribadi yang utuh (*process of becoming*). Peserta didik hendaknya benar-benar dikembalikan sebagai subyek (dan juga obyek) pendidikan dan bukannya obyek semata-mata (Riyanto, <http://bruderfic.or.id/h-60/pendidikan-yang-humanis.html> [8/04/2008]).

Jika dijabarkan lebih rinci, pendidikan multikultural sekurang-kurangnya memiliki lima tujuan. *Pertama*, meningkatkan pemahaman diri dan konsep diri secara baik. *Kedua*, meningkatkan kepekaan dalam memahami orang lain, termasuk terhadap berbagai kelompok budaya di negaranya sendiri dan negara lain. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan untuk merasakan dan memahami kemajemukan, interpretasi kebangsaan, serta budaya yang kadang-kadang bertentangan menyangkut sebuah peristiwa, nilai, dan perilaku. *Keempat*, membuka pikiran ketika merespon isu. *Kelima*, memahami latar belakang munculnya pandangan klise atau kuno, menjauhi pandangan stereotipe dan mau menghargai semua orang (Donna M. Gollnick dan Philip C Chinn, 1991: 6). Dalam implementasinya, paradigma pendidikan multikultural dituntut agar berpegang pada prinsip-prinsip berikut ini:

- Pendidikan multikultural harus menawarkan keaneka-ragaman kurikulum yang merepresentasikan pandangan dan perspektif banyak orang.
- Pendidikan multikultural harus didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada penafsiran tunggal terhadap kebenaran sejarah.
- Kurikulum dicapai sesuai dengan penekanan analisis komparatif dengan sudut pandangan kebudayaan yang berbeda-beda.
- Pendidikan multikultural harus mendukung prinsip-prinsip pokok dalam memberantas pandangan klise tentang ras, budaya dan agama.
- Pendidikan multikultural mencerminkan keseimbangan antara pemahaman persamaan dan perbedaan budaya serta mendorong individu untuk mempertahankan dan memperluas

wawasan budaya dan kebudayaan mereka sendiri (C. Mack, Jr, Juli-Agustus 1992: 1-4).

Nilai dasar dalam pendidikan multikultural adalah toleransi. Oleh karena itu, toleransi merupakan sikap kewargaan yang aktif bukan sikap yang spontan (*La tolerance est une position civique active, et non pas une attitude spontanee*, Fernando Savater), maka sikap toleran tidak akan tertanam dengan sendirinya, tanpa ada usaha sadar menginternalisasikannya (Muhammad Ali, 26 April 2002: 4). Toleransi harus dididikan, tidak cukup berhenti pada wacana. Keputusan majelis ulama, keputusan konsiliasi, kesepakatan sidang dewan gereja-gereja sedunia, dan kesepakatan hasil pertemuan tokoh agama yang menganjurkan toleransi tidak akan cukup efektif bila hanya berhenti di kertas dan bibir, tanpa dukungan pendidikan dalam arti luas.

Pendidikan multikultural dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang saling menghargai perbedaan kenyataan kemajemukan sosial serta menjauhi sikap diskriminatif. Isi dan bahan ajar di sekolah perlu dipilih secara sungguh-sungguh dengan menekankan pengenalan dan penghargaan terhadap budaya dan nilai lain (Paul Suparno, 7 Januari 2003). Misalnya, ketika seorang guru mengajarkan sebuah materi keilmuan perlu memasukkan nilai dan tokoh-tokoh dari budaya lain dengan maksud agar siswa mengerti bahwa ilmu itu dikembangkan dalam tiap budaya. Jika memberi contoh tentang ketokohan seorang ilmuwan dan hasil penemuannya, dia perlu menampilkan sejumlah tokoh dengan latar belakang berbagai budaya dan jender. Dalam proses ini, seorang guru akan bisa menjelaskan kesamaan dan perbedaan antar budaya yang amalannya akan membantu para siswa untuk lebih mengerti tentang nilai-nilai budaya orang lain serta akan mau menerima dan menghargai secara positif. Dalam proses pembelajaran, guru ketika mengajarkan etika sosial menyangkut tata cara makan, berpakaian dan cara hidup hendaknya bukan hanya dijelaskan dari sudut pandang budaya atau etnis tertentu, tetapi juga dijelaskan menurut sudut pandang budaya dan etnis orang lain.

Konsep keragaman budaya yang menjadi dasar dalam pendidikan multikultural diperkenalkan oleh pendidik di hadapan para siswa dengan menggunakan sebuah alat peraga visual berupa payung. Sebut saja payung itu bernama "Payung Multikultural (*The Multicultural Umbrella*)" yang pada tiap-tiap ruas bagian luar payung ditulisi berbagai etnis, ras, agama, budaya, kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan/keadaan khusus seperti anak-anak terlantar, orang-orang cacat, penderita AIDS dan lain-lain (Rose Reissman, 1994: 12).

Atas dasar ini maka proses pendidikan multikultural berorientasi pada siswa atau komunitas tertentu, yang memungkinkan guru memahami keyakinan serta nilai-nilai sosio-budaya siswa dalam konteks kebudayaan masyarakat yang berjalan pada saat dia merancang model pembelajaran yang akan digunakan. Para pendidik pada konteks ini disarankan menggunakan pendekatan antropologis untuk mengidentifikasi berbagai kelompok sosial-budaya, nilai-nilai serta norma-norma yang hidup dan mempengaruhi proses kehidupan sehari-hari. Pendekatan antropologis ini akan membantu para pendidik dalam mengidentifikasi perumusan dan penerapan model pembelajaran yang tanggap budaya dan bisa membentuk sikap positif-apresiasi terhadap perbedaan etnik dan sosio-budaya di kelas, masyarakat, dan nasional (Tjetjep Rohendi Rohidi, 23 September 2002:4).

Implementasi pluralisme budaya dalam semua kegiatan pengajaran atau belajar sebagai cara dalam melaksanakan pendidikan multikultural perlu didasarkan pada empat premis pokok. *Pertama*, penggunaan khasanah keanekaragaman budaya untuk mencapai hasil pelajaran bersama adalah cara paling baik untuk memberi kesempatan secara sama kepada siswa. *Kedua*, keanekaragaman budaya adalah ciri pembawaan atau sifat dari sebuah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Oleh sebab itu, fungsi utama sekolah dalam mensosialisasikan budaya, etnis dan pluralisme budaya secara nasional harus dijadikan elemen utama dari proses pendidikan. *Ketiga*, kajian pluralisme budaya secara pedagogis menembus semua dimensi dari proses pendidikan. Dengan demikian, pluralisme budaya tidak diajarkan sebagai sesuatu yang terpisah atau mata pelajaran distinktif (mandiri), tetapi diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada sebagai semangat dan prinsip pembelajaran. *Keempat*, pendidikan multikultural yang efektif menuntut upaya komprehensif yang memadukan sikap, nilai, isi dan tindakan serta melibatkan semua aspek dari sistem pendidikan secara simultan.

Pendidikan multikultural seyogyanya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang menekankan dominasi sebuah budaya, penuh prasangka dan bersifat diskriminatif ke perspektif multikulturalis yang menghargai keragaman dan perbedaan, toleran dan bersifat terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menuntut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka, namun menuntut transformasi menyeluruh yang mencakup transformasi diri, sekolah dan proses belajar mengajar serta masyarakat.

KESIMPULAN

Penanaman paham multikulturalisme (toleransi beragama) bagi para santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu belum menjadi prioritas utama dan tidak terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan. Materi Multikultural disampaikan oleh para Ustadz kepada para santri di luar kelas (luar jam belajar formal), yaitu melalui khutbah jum'at, kuliah subuh, muhadharah, dan tausiyah. Kalaupun dibicarakan di dalam kelas (jam belajar) sifatnya hanya kebetulan karena ada ayat-ayat yang muatannya bersentuhan dengan nilai-nilai multikultural.

Model komunikasi penyampaian paham multikultural kepada para santri Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu bersifat verbal dan linier (monologis, satu arah), sehingga tidak ada kesempatan bagi santri untuk bertanya dalam rangka mendalami, memahami, dan mendiskusikan sesuatu yang masih belum jelas berkaitan dengan multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 26 April 2002. "Pendidikan Pluralis-Multikultural" dalam *Kompas*, (Jakarta, PT. Kompas).
- Arceneaux, Clayton, J. 1992. "Multicultural Education and Invitational Theory: A Symbiosis" dalam *Journal of Invitational Theory and Practice Online*, (North Carolina: The International Alliance for Invitational Education (IAIE), Vol. 1, No.2).
- Banks, J. A. 1997. "Multicultural education: Characteristics and goals" In J. A. Banks and C. A. M. Banks (Eds.) *Multicultural education: Issues and perspectives*, (Boston, Allyn and Bacon).
- Budianta, Melani. 2003. "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural, Sebuah Gambaran Umum" dalam *Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia*, (Jakarta: INCIS dan CSSP_USAID).
- Chirzin, Chabib, M. 26 Juli 1995. "Pendidikan Global untuk Masa Depan Bersama", *Republika*, (Jakarta).
- Direktori Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu, 2005.
- Edyar, Busman. 31 Maret 2003. "R Sisdiknas dan Pendidikan Pluralis-Multikultural", dalam *Kompas*, (Jakarta, PT. Kompas).
- Gary, Burnett. 1994. "Varieties of Multicultural; An Introduction" dalam *Ericfacility.net* (New York: Eric Clearinghouse on Urban Education). http://www.ericfacility.net/databases/ERIC_Digests/ed372146.html.
- Gay, Geneva. 1994. "A Synthesis of Scholarship in Multicultural Education" dalam *Urban Education Monograph Series*, (Washington, NCREL's Urban Education Program).
- Gollnick Donna, M dan Philip C Chinn. 1991. *Multicultural Education for Exceptional Children. E*, (IC Clearinghouse on Handicapped and Gifted Children Reston VA).
- Gorski, Paul. 2003. "Multicultural Philosophy Series, Part 1: A Brief History of Multicultural Education" dalam *The McGraw Hill Education Papers online*, (The McGraw-Hill Companies).
- Hidalgo, Francisco. 2003. *Multicultural Education Landscape For Reform In Twenty First Century* (New Mexico, New Mexico State University).
- Mack, C., Jr. Juli–Agustus 1992. "Mistaken Identity and Issues in Multicultural Education." *Updating School Board Policies 23*.
- Martin, Donna, J, et.all. 2003. "Issues of Feminism and Multicultural Education for Educational Technology" dalam *Instructional Technology online*, (Athens, The University of Georgia). <http://itech1.coe.uga.edu/itforum/paper38/paper38.html>.
- McCarthy, Cameron. 1994. "Multicultural Discourses and Curriculum Reform: A Critical Perspective" dalam *Journal Winter Online*, (Illinois, University of Illinois, Number 1 Volume 44).
- Reissman, Rose. 1994. "The Evolving Multicultural Classroom" dalam *ASCD Publication*, (New York, ASCD).
- Rohendi, Rohendi, Tjetjep. 23 September 2002. "Pendidikan Seni Multikultural" dalam *Kompas*, (Jakarta, PT Kompas).
- Romanowski, Jennifer. 2002. "Exploring My Practicum Community A Critical Analysis of Multicultural Education Initiatives" in the *Winning Paper*, (Nipissing University).
- Semiawan, Conny. 14 September 2003. "Memelihara Integrasi Sosial dan Menegakkan HAM Melalui Pendidikan Multikultural" dalam *Sari Makalah Seminar Integrasi Sosial dan Penegakkan HAM*, (Ditjen HAM).
- Sirry, Mun'im, A. 1 Mei 2003. "Agama, Demokrasi, dan Multikulturalisme", dalam *Kompas*. (Jakarta, PT Kompas).

Soekarnoputri, Megawati, 8 Juli 2003, *UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Lembaran Negara).

Soenarjo, R. H. A. 1971, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI).

Subagyo, Agus, 28 Desember 2001, "Multikulturalisme di Tengah Kultur Monolitik dan Uniformitas Global", dalam *Kompas*, (Jakarta, PT. Kompas).

Suparlan, Parsudi, 2003, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural" dalam *Artikel CMDD*, (Jakarta, CMDD Online). http://www.scripps.ohiou.edu/news/cmdd/artikel_ps.htm.

Suparno, Paul, 7 Januari 2003, "Pendidikan Multikultural" dalam *Kompas*, (Jakarta, PT Kompas).

Watkins, William, H. 1994, "Multicultural Education: Toward a Historical and Political Inquiry" dalam *Journal Winter Online*, (Illinois, University of Illinois, Number 1 Volume 44).

